

Diplomasi Digital dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Resensi Buku

Ferdian Ahya Al Putra
Universitas Sebelas Maret



Judul	:Diplomasi Digital dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia
Penulis	: Humphrey Wangke
Penerbit	:Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Cetakan	: 2020
Tebal	: 140 halaman

Buku ini membicarakan mengenai konsep diplomasi yang diterapkan di era digital. Pembahasan pada buku ini mengaitkan dengan kebijakan luar negeri Indonesia serta memfokuskan pada penerapannya di Indonesia yang mengarah pada konteks diplomasi ekonomi. Diplomasi digital atau diplomasi di era digital seringkali dikaitkan dengan situasi saat ini dimana diplomasi dilakukan dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan model diplomasi tradisional. Diplomasi digital dalam buku ini mengutip penjelasan dari Fergus Hanson yang merujuk pada penggunaan internet dan teknologi komunikasi informasi untuk membantu mencapai dan memperkuat tujuan nasional (Hanson, 2012). Sementara, terminologi digital menurut KBBI memiliki makna “berkaitan dengan atau menggunakan komputer atau internet”. Dengan demikian, dapat dipahami bahwasanya penggunaan berbagai instrumen digital dapat berkontribusi pada tercapainya suatu tujuan nasional. Namun, buku ini menekankan bahwa kehadiran diplomasi digital di sini bukan untuk menggantikan diplomasi tradisional, melainkan untuk melengkapi atau memperkuat kinerja negara dalam hubungan internasional atau dalam konteks diplomasi tradisional. Ini berarti bahwa diplomasi dapat dilakukan untuk mempengaruhi berbagai pihak, yang bahkan tidak pernah mengunjungi kedutaan sekalipun. Pada konteks ini, penulis mengaitkannya dengan konteks privatisasi diplomasi,

yang mengungkapkan bahwa aktor yang terlibat dalam proses diplomasi tidak terbatas pada aktor negara, tetapi juga pada aktor non negara seperti individu, perusahaan multinasional (MNCs), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Internasional, kelompok minoritas, dan sebagainya. Dengan demikian pemberdayaan seluruh aktor dalam berbagai aktivitas diplomasi dan hubungan internasional dalam konteks *total diplomacy* dapat didorong secara integratif dan menyeluruh dapat diwujudkan, khususnya dengan memanfaatkan berbagai media social maupun instrumen digital lainnya.

Masih berkaitan dengan konsep diplomasi digital, penulis menggunakan pendapat dari Nicholas Westcott yang menyebutkan bahwa diplomasi digital berimplikasi terhadap pembuatan kebijakan luar negeri pada empat bidang, yang meliputi ide, informasi, jaringan, dan pemberian layanan (Westcott, 2008). Berdasarkan bidang – bidang tersebut, penulis buku ini menekankan bahwa seorang diplomat harus memahami internet dengan baik, yaitu kaitannya dengan upaya mereka untuk mengetahui dan bagaimana mereka dapat mengumpulkan informasi yang paling tepat sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta kaitannya dengan upaya untuk mempengaruhi publik pada perdebatan yang sering terjadi, termasuk yang terjadi di media sosial. Humphrey Wangke dalam buku ini juga menggambarkan mengenai potensi digital dunia, termasuk juga berbagai platform media sosial yang paling banyak digunakan berdasarkan laporan Global Statshot Juli 2021 yang menempatkan *Facebook* pada urutan pertama, kemudian diikuti oleh *Youtube* dan *Whatsapp* di urutan ke dua dan ke tiga. Selanjutnya ia juga menyebutkan sejumlah lebih dari 346 juta orang telah terhubung dengan internet (Wangke, 2021). Diplomasi yang didukung dengan internet dan media sosial, telah mendorong pada dunia digital dengan praktik yang lebih terbuka, dan transparan sehingga seluruh proses dan hasil diplomasi dapat diakses dengan lebih cepat oleh masyarakat.

Pada bagian selanjutnya, penulis mengaitkan diplomasi digital dengan ekonomi internasional, termasuk di dalamnya ialah perdagangan internasional. Kemajuan teknologi dan informasi pada konteks perdagangan internasional dalam buku ini dinilai berperan penting, misalnya untuk memangkas biaya produksi, dan mengalihkan produksi ke negara lain sehingga mampu mendorong proses industrialisasi di negara – negara berkembang. Keuntungan dengan adanya perdagangan internasional tersebut merupakan *gain from trade* yang berkontribusi pada kesejahteraan suatu negara. Namun, penulis disini turut menyebutkan mengenai tantangan yang mungkin muncul dalam perdagangan internasional, salah satunya ialah proteksionisme. Penulis kemudian mengambil contoh kasus pada saat Donald Trump terpilih menjadi presiden dengan kebijakannya

yang bernuansa proteksionisme dan kasus Brexit ketika Inggris keluar dari Uni Eropa yang menunjukkan sulitnya untuk menciptakan integrasi ekonomi yang lebih terbuka. Penulis mengaitkan kasus tersebut dengan *globalization trilemma* yang dicetuskan oleh Dani Rodrik untuk menjelaskan bagaimana suatu negara tidak mungkin menerapkan secara bersamaan antara demokrasi, kedaulatan nasional, dan globalisasi. Pada bagian ini penulis lebih banyak berbicara mengenai perdagangan internasional, dan menekankan bahwa seharusnya kondisi idealnya tidak hanya sekedar bebas (*free trade*) tetapi harus adil (*fair trade*). Pada bagian ini lebih banyak berbicara mengenai dinamika perekonomian global, termasuk ketika terjadinya resesi global akibat pandemi serta saat terjadi persaingan atau perang dagang antara China dan Amerika Serikat (AS). Buku tersebut mengulas mengenai bagaimana sebelumnya, tepatnya pada tahun 2018 AS merupakan mitra dagang 80 persen negara – negara di dunia namun, pada tahun 2018 turun drastis menjadi 30 persen. Sementara China menjadi mitra dagang 128 dari 190 negara. Situasi ini mengindikasikan keberhasilan diplomasi ekonomi China. Penulis juga mengulas mengenai strategi untuk berhasil dalam diplomasi ekonomi, yaitu ialah suatu negara harus memiliki kebijakan yang mampu mendorong industri dalam negerinya berkembang, seperti halnya yang dilakukan oleh China, yaitu membiarkan barang atau komoditas impor masuk setelah industri dalam negerinya berkembang. Disebutkan pula bahwa persaingan keduanya merupakan persaingan antar teknologi, seperti masuknya *platform* digital dari luar yang baru diizinkan masuk setelah *platform* dalam negeri China seperti Weibo telah menguasai pasar domestiknya.

Pada bagian akhir, buku ini menghubungkan kembali pembahasannya pada konteks diplomasi digital, bahwasanya kehadiran teknologi dan informasi mendorong diplomasi yang lebih beragam, termasuk para aktor yang terlibat di dalamnya. Diplomasi di era digital ini juga membutuhkan dukungan publik pada proses pengambilan kebijakan, hal yang mungkin jarang atau bahkan tidak terjadi sebelumnya pada konteks diplomasi tradisional. Mengutip kalimat Christer Jonsson, “*Without communication, there is no diplomacy*” (Jönsson, 2016), menunjukkan arti penting komunikasi yang di era digital ini komunikasi sifatnya lebih terbuka dimana publik dapat lebih banyak terlibat. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi telah mengaburkan batas antara domestik dan internasional. Penulis turut menjelaskan bahwa Kementerian Luar Negeri Indonesia telah membangun *Diplomatic Digital System (DDS)*, yang merujuk pada seluruh jaringan yang terdapat di kedutaan, konsulat, Lembaga pemikir, perusahaan swasta, dan kelompok masyarakat sipil yang mana mereka berperan pada pembentukan profil diplomasi digital negara. Buku ini juga mengulas bagaimana pemerintah Indonesia berupaya untuk

menyampaikan pesan perdamaian dengan memanfaatkan berbagai *platform* media social seperti *facebook*, *Twitter*, hingga Instagram.

Lebih lanjut, penulis menjelaskan mengenai diplomasi parlementer yang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh anggota parlemen atau pun parlemen sebagai institusi dalam rangka meningkatkan kesepemahaman antar negara dan bentuk pengawasan terhadap pemerintah. Kemudian, diplomasi digital juga memiliki fungsi *branding* yaitu sebagai upaya untuk mendorong *nation branding* yang bertujuan untuk memancarkan dan membentuk citra suatu negara. Berkaitan dengan *nation branding*, berbagai aktor tentunya dapat terlibat secara aktif, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan infrastruktur digital yang dapat dijangkau dengan mudah. Musisi sekaligus *content creator* Alffy Rev, merupakan bukti konkret bahwa dengan memanfaatkan *Youtube*, ia berhasil memukau berbagai *viewers* dari berbagai negara dengan karyanya yang menampilkan budaya khas Indonesia, mulai dari lagu tradisional, tarian tradisional, hingga situs bersejarah yang dikemas dengan memaksimalkan kecanggihan teknologi. Ini tentunya dapat mendorong *nation branding* Indonesia, khususnya dalam bidang budaya dan pariwisata (Putra, 2021).

Secara keseluruhan, buku ini mudah dipahami dan memberikan pemahaman mengenai konsep dasar mengenai diplomasi digital, khususnya terkait penerapannya di Indonesia. Buku ini dapat bermanfaat baik bagi akademisi, peneliti, praktisi, wirausahawan maupun masyarakat secara umum yang memiliki minat terhadap bentuk diplomasi baru. Buku ini dapat menjadi pegangan bagi mereka yang ingin memanfaatkan peluang di tengah kemajuan teknologi dan informasi. Selain itu, dengan membaca buku ini, pembaca mungkin akan menyadari bahwa pihaknya pernah atau dapat berkontribusi dalam proses diplomasi sesuai dengan keahliannya karena buku ini mampu membuka jendela kita terhadap diplomasi yang lebih luas dan dapat dijangkau. Bagi penulis atau pun peneliti pada bidang ini, hendaknya dapat memberikan contoh yang lebih beragam terkait praktik diplomasi digital, khususnya dalam kehidupan sehari – hari, sehingga pembacara dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai diplomasi digital di masa mendatang.

Daftar pustaka

- Hanson, F. (2012). *Revolution@ State: The Spread of Ediplomacy*. Lowy Institute for International Policy.
- Jönsson, C. (2016). *Diplomacy, Communication and Signaling*. London: SAGE.
- Putra, F. A. A. (2021). Wonderland Indonesia dalam Lensa Diplomasi Budaya di Era Digital [Online]. 25 Agustus. Tersedia di: <<https://kumparan.com/ferdian-ahya-al-p/wonderland-indonesia->

dalam-lensa-diplomasi-budaya-di-era-digital-1wOZIM3yN4O>
[diakses 29 Juni 2023].

Wangke, H. (2021). *Diplomasi Digital dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Westcott, N. (2008). Digital Diplomacy: The Impact of the Internet on International Relations. *OII Working Paper*, No. 16.